

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Di era globalisasi saat ini, pelaksanaan kebijakan pemerintah yang optimal adalah kebutuhan sosial untuk mewujudkan visi dan misi pemerintahan yang baik. Kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh otoritas publik saat ini dapat di monitor tanpa hambatan oleh masyarakat umum. Aturan-aturan dalam penyelenggaraan organisasi publik berbasis *good governance* merupakan komitmen saat ini mengingat dalam penyelenggaraannya diandalkan untuk memberikan arahan yang jelas sehingga dapat berpengaruh terhadap kemajuan kinerja suatu instansi (Ratna Sari, 2016). Upaya otoritas publik untuk mengatasi tuntutan publik difokuskan pada perwujudan negara serta tujuannya.

Sistem desentralisasi merupakan perwujudan untuk mengarahkan dan menangani kebutuhan publik dengan kondisi dan kemampuan daerahnya sendiri. Dalam pelaksanaan pengembangan potensi daerah, pemerintah daerah diberikan kemandirian untuk mengelola hasil dan daya guna. Perwujudan gagasan otonomi daerah diharapkan oleh masyarakat terhadap otoritas publik agar dalam melaksanakan kewajibannya memiliki kinerja yang optimal. Pendekatan hubungan antara pemerintah dengan kebutuhan publik dapat diwujudkan dengan adanya otonomi daerah. Pelayanan publik yang ditingkatkan dan pembangunan sektor publik yang

merata merupakan perwujudan yang dilakukan pemerintah dengan melangkah kearah yang lebih baik (*good governance*) (Sunardi et al., 2019).

Penyelenggaraan negara yang bertumpu pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, ketanggapan, aturan hukum, efisiensi, efektivitas, keterkaitan, visi strategis, keadilan dan arah untuk kepentingan umum menyiratkan bahwa dalam penyelenggaraan negara mengaplikasikan prinsip *good governance*. Pengelolaan kepentingan publik dengan cara yang baik dan optimal dapat didefinisikan sebagai *good governance* (Mardiasmo, 2018). Indikator tata kelola yang baik dapat mengacu pada prinsip *good governance* karena prinsip tersebut bersifat universal dan objektif. Penggunaan prinsip *good governance* memudahkan otoritas publik untuk menjalankan tugas pemerintahan dan mempertanggungjawabkan hasil kinerjanya terhadap publik (Sunardi et al., 2019).

Kinerja aparatur pemerintah saat ini menjadi suatu permasalahan dikarenakan masyarakat belum dapat merasakan hasil dari kinerja pemerintah secara maksimal. Kesejahteraan rakyat menjadi sebuah tuntutan masyarakat terhadap aparatur pemerintah agar dapat mengemban tanggung jawab tugasnya dengan lebih baik. Bekerja dengan cara yang mulia dalam perspektif Islam berhubungan dengan keyakinan atau keimanan terhadap Allah SWT. Seperti di dalam Surat At-Taubah ayat 105 :

وَقَالِ عَمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى
 عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٥

Artinya : Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan (Q.S At-Taubah : 105)

Berdasarkan ayat Al-Qur'an diatas menunjukkan bahwa kerja dapat disetarakan dan diindikasikan sebagai perwujudan keimanan dari seseorang itu sendiri. Tujuan utama dari bekerja lebih jauh adalah bukan hanya untuk mencari sebuah materi tetapi keimanan yang merupakan bagian dari firman Allah. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang mulia dapat dilakukan dengan bekerja karena anjuran yang Allah berikan, serta yang lain yaitu zakat, infaq, dan sedekah dapat dilakukan seseorang apabila mereka bekerja.

Penelitian ini menggunakan teori *stewardship* sebagai landasan teori. Teori *stewardship* yang dicetuskan oleh Donaldson & Davis, (1991) menjelaskan bahwa pimpinan lebih mementingkan pencapaian tujuan organisasi daripada pencapaian tujuan suatu individu atau pribadi. Berdasarkan teori *stewardship*, kinerja suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai terdapat faktor yang berperan penting yaitu pencapaian kepentingan bersama menjadi target utama dalam suatu organisasi dibandingkan dengan kepentingan suatu individu.

Dalam mempertahankan kualitas kinerja suatu organisasi, pemeran penting saat melakukan segala pekerjaan di organisasi ialah karyawan.

Suatu organisasi perlu memperhatikan tingkat kapasitas seorang pemimpin. Tingkat kapasitas kepemimpinan menjadi salah satu faktor agar dapat diterima oleh semua pegawai untuk membangun lingkungan yang kondusif dan ideal. Dengan adanya nilai kekeluargaan yang baik pada lingkungan kerja, Kinerja suatu pegawai dapat ditingkatkan. Tujuan organisasi ditentukan oleh kapasitas pemimpin dalam menentukan suatu keputusan. Pemimpin yang dapat mempengaruhi semua pekerja dalam mencapai tujuan organisasi merupakan kriteria dalam mengevaluasi efektifitas kepemimpinan (Hendriyaldi, 2019).

Pada suatu organisasi, terdapat faktor lainnya yang turut berperan dalam meningkatkan kinerja pegawai, yaitu faktor organisasional (Ratna Sari, 2016). Salah satu faktor organisasional tersebut ialah gaya kepemimpinan transformasional. Suatu organisasi perlu melaksanakan transformasi kepemimpinan dan berorientasi pada jangka panjang agar kinerjanya dapat bersaing di masa yang akan datang. Kepemimpinan erat kaitannya dengan suatu organisasi. Gaya kepemimpinan transformasional dapat berdampak terhadap bawahan agar memiliki inspirasi dalam mewujudkan pemikiran pemimpinnya (Perawati, 2018).

Organisasi sektor publik membutuhkan gaya kepemimpinan dari seorang pemimpin karena gaya kepemimpinan adalah faktor kunci yang memiliki peranan terhadap organisasi agar dapat memberikan pelayanan terhadap publik secara optimal. Pemimpin perlu mengkoordinasikan dan mempengaruhi kelompoknya agar tujuan organisasi dan kelompoknya

dapat tercapai (Ratna Sari, 2016). Mempengaruhi pegawai untuk bekerja secara optimal dalam mencapai tujuan organisasi merupakan hakikat dari organisasi sektor publik dalam pelayanan terhadap publik. Faktor yang begitu mempengaruhi terkait kelancaran pada organisasi dalam mencapai tujuan organisasi yaitu sistem kepemimpinannya (Evi Wahyuni, 2015).

Penelitian tentang pengaruh prinsip-prinsip *good government governance* dan faktor organisasional akan dilakukan di pemerintahan Kabupaten Bungo. Penilaian kinerja pemerintah daerah Bungo tahun 2020 dalam perbaikan tata kelola pemerintahan dan pembangunan sistem di beberapa sektor masih belum menunjukkan kinerja yang baik. Berdasarkan penilaian kinerja yang dilakukan oleh Tim Nasional Pencegahan Korupsi yang terdiri dari gabungan 5 Kementerian yaitu Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kantor Staf Presiden, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional yang bernama Stranas PK atau Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

Penilaian area intervensi pemerintah daerah Bungo bagian Perencanaan dan Penganggaran APBD menunjukkan kinerja yang belum optimal. Indeks menunjukkan kinerja untuk bagian tersebut adalah 69.5%. Implementasi yang baik berada pada indeks yaitu lebih dari 75%. Penilaian dihitung berdasarkan kriteria dan sistem yang telah ditentukan oleh Stranas PK Tahun 2020. Organisasi Sektor Publik di pemerintah daerah Bungo di beberapa sektor telah menunjukkan kinerja yang optimal seperti Pelayanan

Terpadu Satu Pintu dengan indeks kinerja 98.8%, Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) 75.2% , dan Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah 75% . Berdasarkan hal tersebut, aspek transparansi dan partisipasi publik secara luas perlu menjadi basis dalam perencanaan dan penganggaran. Perencanaan kepentingan publik dalam program pembangunan yang di aplikasikan pada teknologi informasi perlu diawasi dan diakomodir masyarakat secara terbuka.

Pengukuran kinerja dalam mewujudkan akuntabilitas di suatu pemerintahan merupakan bagian yang vital. Dalam mengukur suatu kinerja dibutuhkan suatu pengukuran indikator sebagai alat ukur efisiensi, efektivitas dan ekonomis untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai (Sunardi et al., 2019). Berdasarkan penilaian Stranas PK pada tahun 2020, pemerintah daerah Bungo perlu menerapkan sistem yang terintegrasi sebagai pembangunan sistem dan perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik dan optimal. Pencegahan intervensi dari pihak eksternal dapat dilakukan dengan adanya sistem yang telah terintegrasi secara baik. Kepentingan publik setelah anggaran pendapatan dan belanja daerah ditetapkan, proses penyusunan perlu diakomodir agar kepentingan pihak eksternal yang bukan menjadi kebutuhan publik dan proyek-proyek dengan ketentuan yang tidak wajar dapat dicegah. Pihak eksternal yang melakukan intervensi tanpa mekanisme musyawarah perencanaan dan pembangunan (musrenbang) memiliki kepentingan untuk mencari keuntungan secara sepihak (Stranas PK, 2020).

Pengukuran kinerja suatu instansi yang dilakukan oleh Stranas PK ditinjau salah satunya berdasarkan capaian progres indikator perencanaan dan penganggaran APBD pada pemerintahan daerah tersebut.

Tabel 1.1
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Progres Indikator
1	Aplikasi Perencanaan APBD	100%
2	Dokumentasi RPJMD	100%
3	Dokumentasi Musrenbang, Pokir DPRD, dan Forum Perangkat Daerah	100%
4	Standar Satuan Harga (SSH)	50%
5	Analisis Standar Biaya (ASB)	25%
6	Penganggaran APBD	80%
7	Integrasi Aplikasi Perencanaan dan Penganggaran APBD	0%

Sumber: Jaga.id (2020)

Berdasarkan Tabel 1.1 capaian indikator kinerja terdapat beberapa area yang masih belum mencapai angka yang optimal, antara lain standar satuan harga (SSH) yang terdiri dari sub indikator yaitu penetapan SSH, implementasi SSH, tindak lanjut reviu SSH, dan reviu SSH. Kemudian analisis standar biaya (ASB) yang terdiri dari sub indikator yaitu penetapan ASB dan HSPK, tindak lanjut reviu ASB dan HSPK, reviu ASB & HSPK, kesesuaian SSH & ASB dan implementasi ASB/ HSPK. Dan yang terakhir yaitu integrasi aplikasi perencanaan dan penganggaran.

Pada penelitian yang akan dilakukan ialah menggunakan replikasi berdasarkan penelitian Pratiwi & Permata, (2018) terkait variable *good government governance*, pemahaman peraturan pemerintah, dan kualitas sumber daya sebagai variabel independen. Penggunaan variable independen merujuk pada penelitian Ratna Sari, (2016) yaitu gaya kepemimpinan

transformasional menggantikan variabel pemahaman peraturan pemerintah dan kualitas sumber daya. Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan penelitian saya sekarang mempunyai perbedaan antara penggunaan variabel dan obyek. Tempat pengambilan sampel terletak di Kabupaten Bungo tepatnya pada BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah).

Kinerja aparatur pemerintah daerah Bungo di sektor yang menangani perencanaan dan penganggaran APBD dinilai kinerjanya masih kurang optimal. Penelitian yang dilakukan oleh Gustianra & Serly, (2019) dan Ratna Sari, (2016) menunjukkan hasil bahwa *good government governance* dan gaya kepemimpinan transformasional tidak berpengaruh positif terhadap kinerja suatu organisasi. Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan, peneliti tertarik untuk melakukan replikasi penelitian terkait variabel tersebut dengan obyek penelitian yang berbeda. Penelitian ini berjudul **“Pengaruh *Good Government Governance* dan Faktor Organisasional terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bungo)”**.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Rumusan masalah penelitian ini berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Apakah *good government governance* berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah Bungo?

2. Apakah gaya kepemimpinan transformasional berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah Bungo ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan bukti empiris apakah *good government governance* berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah Bungo.
2. Untuk mendapatkan bukti empiris apakah gaya kepemimpinan transformasional berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah Bungo.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pemerintah Kabupaten Bungo dan berbagai pihak yang membutuhkan baik dari segi teoritis maupun praktis. Manfaat dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk pengembangan penelitian selanjutnya terkait dengan faktor yang mempengaruhi kinerja aparatur pemerintah daerah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap organisasi perangkat daerah terkait mengenai faktor yang mempengaruhi kinerja aparatur pemerintah daerah agar dalam pelayanan terhadap publik dapat memberikan manfaat yang optimal.